

PASCA DITERTIBKAN SATPOL PP

PKL di KBB Minta Pemda Beri Solusi

Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk memberikan solusi agar mereka bisa tetap berjualan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Satpol PP KBB menertibkan puluhan PKL yang berjualan di bahu jalan dan trotoar di kawasan Tagog Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Salah satu PKL, Ubed (40) mengaku, saat ini dirinya tengah kebingungan untuk mencari lokasi berjualan usai lapaknya dibongkar Satpol PP KBB.

Ia berharap, pemerintah bisa segera memberikan solusi agar para PKL bisa tetap berjualan.

"Jangan hanya melihat peraturan saja. Pemerintah harus memberikan solusi juga," katanya saat ditemui wartawan, kemarin.

Ia mengaku, pihaknya keberatan jika hanya para PKL pagi saja yang ditertibkan. Sementara, sore dan malam ada juga PKL yang berjualan.

"Alasannya kan peraturan daerah (Perda) dan Undang-undang, tapi lihat yang berjualan di sini, ada juga yang sore dan mereka itu berjualan di bahu jalan tapi tidak ditertibkan," keluhnya.

Oleh karenanya, kata dia, pihaknya meminta Pemda KBB agar dapat memberikan solusi untuk para PKL yang ditertibkan di Jalan Raya Tagog Padalarang.

"Kami minta solusinya, tidak hanya sebatas penerbitan," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya pun mengerti dan menyadari dan bahwa berjualan di bahu jalan itu melanggar. Namun, pemerintah tidak memberikan solusi.

"Ini tempat kami mencari nafkah untuk makan keluarga," ucapnya. ● pra

BPBD Kabupaten Cirebon Terima Trailer Dapur Lapangan BNPB

CIREBON (IM) - BPBD Kabupaten Cirebon mendapatkan satu unit trailer dapur lapangan untuk korban bencana dari BNPB. Untuk Jabar, bantuan itu hanya diterima Kabupaten Cirebon.

Usai menerima bantuan, Bupati Cirebon, Imron mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurutnya, bantuan trailer dapur lapangan itu akan dimanfaatkan BPBD Kabupaten Cirebon untuk penyediaan pangan untuk korban bencana.

Masyarakat jika perlu fasilitas dapur umum, maka mobil yang ada di BPBD Kabupaten Cirebon ini bisa dipergunakan," ujar Imron, Jumat (10/6).

Disinggung mengenai diperolehnya bantuan, lantaran wilayah Kabupaten Cirebon termasuk daerah rawan bencana, Imron tidak menampikinya. Hanya saja, dirinya juga mengaku senang dengan kinerja BPBD Kabupaten Cirebon yang terbukti bisa mendapatkan bantuan dari

pemerintah pusat.

"Ini hasil kerja dan lobi BPBD Kabupaten Cirebon. Saya selalu meminta kepada dinas untuk tetap menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi. BPBD sudah membuktikan kalau komunikasi yang baik, akan menghasilkan sesuatu yang baik pula," ungkapnya.

"Bukan hanya untuk Kabupaten Cirebon saja, jika daerah tetangga memerlukan juga bisa, selama ada koordinasi dengan kita," jelasnya.

Untuk pengelolaannya kedepan, Alex menyebut akan bekerja sama dengan Dinas Sosial guna pemenuhan bahan pangannya. Menurutnya, selama ini untuk dapur umum disediakan oleh Dinsos.

"Apabila ada dua tempat terjadinya bencana, maka dapur umum bisa dihandle oleh BPBD dan Dinsos. Kita akan terus berkolaborasi, karena pada dasarnya, trailer dapur lapangan ini memiliki fasilitas yang cukup komplit dan bisa dimanfaatkan secara maksimal," tutupnya. ● pra

8 | Nusantara



APEL SIAGA DARURAT KARHUTLA JAMBI

Gubernur Jambi Al Haris (kedua kanan), didampingi Danrem 042/Garuda Putih Jambi Brigjen TNI Supriono (kanan) dan Kepala BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah (ketiga kanan) memeriksa kelengkapan alat pemadam saat Apel Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Jambi Tahun 2022 di Makorem 042/Garuda Putih, Jambi, Jumat (10/6). Gubernur Jambi Al Haris menyebutkan bencana Karhutla telah menghanguskan 62 hektare lahan di daerah itu sepanjang tahun ini.

BPOM Temukan Dua Pabrik Tahu di Parung Gunakan Formalin

Menurut Kepala BPOM RI, Penny K Lukito, sejak dilarangnya penggunaan formalin untuk bahan pangan, pemerintah memberikan pemahit untuk setiap bahan formalin berbentuk cair, sehingga jika digunakan, akan terasa pahit. Namun, dua pabrik tersebut menggunakan bahan formalin berbentuk serbuk yang belum dicampur dengan pemahit.

PARUNG (IM) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap adanya dua pabrik tahu yang menggunakan bahan formalin di

Desa Waru dan Desa Waru Kaum, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6).

"Penggunaan bahan berba-

haya di jalur pangan, formalin ini temuan yang cukup besar," ujar Kepala BPOM RI, Penny K Lukito didampingi pejabat perwakilan dari Polda Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat konferensi pers di pabrik tahu yang berlokasi di Desa Waru Kaum.

Dari kedua pabrik tahu dengan kapasitas produksi 120 juta tahu per bulan itu, BPOM mendapati 38 kilogram formalin jenis serbuk dan 60 kilogram formalin jenis cair.

Menurutnya, BPOM bersama Kepolisian juga menyita sekitar 1.500 tahu yang siap didistribusikan ke

tiga pasar di berbagai daerah, yakni Pasar Ciputat, Pasar Parung, dan Pasar Jembatan Dua Jakarta.

Penny menyebutkan, sebagai sanksi awal, kedua pabrik tersebut ditutup sehingga tidak aktivitas produksi tahu. Kemudian, kedua pemiliknya yang berinisial S (35) dan N (45) segera ditetapkan sebagai tersangka.

"Berdasarkan Undang-undang pangan, sanksinya lima tahun penjara atau denda Rp10 miliar, karena ini menggunakan bahan berbahaya untuk pangan," kata Penny.

Ia mengaku kecewa masih menemukan sejumlah pabrik tahu yang menggunakan formalin saat intensif melakukan pengawasan tempat pengolahan pangan di 10 provinsi sejak awal tahun 2022.

Pasalnya, sejak tahun 2016, pemerintah melarang formalin untuk masuk ke jalur pengolahan pangan.

Shingga, pemanfaatannya hanya untuk non-pangan seperti produksi kayu dan

pengawetan jenazah.

"Berkat kerja sama yang baik, beberapa tempat sudah bersih dari penggunaan formalin. Sanksi akan ditegakkan lebih tegas lagi," ujarnya.

Padahal, menurut Penny sejak dilarangnya penggunaan formalin untuk bahan pangan, pemerintah memberikan pemahit untuk setiap bahan formalin berbentuk cair.

Shingga jika digunakan untuk bahan pangan, akan terasa pahit dan memberikan kesan sebagai makanan tidak layak konsumsi.

Namun, dua pabrik tersebut menggunakan bahan formalin berbentuk serbuk yang belum dicampur dengan pemahit.

"Mereka yang mengambil keuntungan, kejahatan pangan, menggunakan jenis lain, (formalin) padatan atau partikel. Mereka ada proses menjadikan cair. Tentu tidak ada pemahitnya. Saya kira ini sangat mengecewakan, menyedihkan," tuturnya. ● pp



PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA Sejumlah pegiat lingkungan menebar benih ikan ke sungai saat memperingati hari lingkungan hidup sedunia di sungai Progo Temanggung, Jawa Tengah, Jumat (10/6). Aksi bakti lingkungan dengan menanam pohon dan penebaran bibit ikan yang diikuti oleh ratusan relawan dan pegiat lingkungan dari berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

Operasi Tertib Pajak Kab. Bogor, Banyak Pengemudi tak Bayar Pajak

BOGOR (IM) - Gelaran operasi tertib pajak Sat Lantas Polres Bogor, Dinas Perhubungan

Kabupaten Bogor dan Bapenda Provisi Jawa Barat bakal digelar selama dua pekan mendatang.

Dalam operasi tertib pajak, itu para pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) atau membayar pajak akan dikenakan sanksi tilang.

"Petugas gabungan mulai kemarin hingga 13 hari selanjutnya akan melakukan operasi taat pajak, bagi kendaraan bermotor yang KTMDU atau tidak membayar pajak, maka akan ditilang dan diminta membayar pajak kendaraannya," kata Kepala Sat Lantas Polres Bogor, AKP Dicky Anggi Pranata kepada wartawan, kemarin.

AKP Dicky Anggi Pranata menuturkan bahwa Sat Lantas Polres Bogor, Dinas Perhubungan dan Bapenda Provisi Jawa Barat terus akan menekan angka KTMDU di Bumi Tegar Beriman.

"Saat ini, di Kabupaten Bogor ada 28 hingga 30 persen kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak atau KTMDU kendaraan miliknya, selain operasi tertib pajak, kami juga ada upaya lainnya," tutur

AKP Dicky Anggi Pranata.

Kanit Turjawali Sat Lantas Polres Bogor, Ipda Ardian Noviantasari menerangkan walaupun baru dua hari dilaksanakan, operasi tertib pajak sudah banyak menemukan pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran pajak kendaraan bermotornya, "terang Ipda Ardian Noviantasari.

Ia melanjutkan, para pemilik yang melakukan pelanggaran ketidaksiplinan dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, bisa membayar pajaknya di lokasi operasi tertib pajak.

"Selain di lokasi operasi tertib pajak, para pemilik yang melakukan pelanggaran ketidaksiplinan dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, bisa membayar pajaknya di Kantor Samsat Kabupaten Bogor atau juga bisa untuk sementara membayarnya via Bank Jabar Banten (BJB) atau bank lainnya," lanjutnya. ● gio

Perusahaan Ambil Air Tanpa Izin Dapat Diproses Hukum

PAKAR (IM) - Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah menegaskan, jika PT DFT tidak bisa menajukan izin pengambilan air, maka aparat penegak hukum harus segera memproses kasus tersebut.

Pengambilan air yang diduga tanpa izin tersebut, antara lain di Blok Lebak Lewang, Desa Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. "Ini bisa menjadi bukti awal. Kalau memang tidak bisa menunjukkan izin, jelas ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air," kata Trubus kepada media Jumat (10/6).

Pasal 70 memang menyebutkan tentang ancaman pidana bagi pelaku. Dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan dengan sengaja, maka dipidana dengan penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun. Selain itu juga dikenakan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar.

"Perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran seperti

ini, tentu harus ditindak tegas. Harus segera diproses secara hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum memulai dengan penyelidikan. Kemudian bertahap ke penyidikan dan selanjutnya ke tingkat penuntutan. Itu yang harus dilakukan," lanjut Trubus.

Hal lain, jelasnya, aparat hukum juga harus berkoordinasi dengan instansi terkait. Koordinasi dilakukan, untuk memastikan seberapa lama pengambilan air tanpa izin tersebut dilakukan perusahaan.

Dalam hal ini, sekaligus untuk mengetahui bagaimana koordinasi dan pengawasan yang dilakukan selama ini. Menurut Trubus, pelanggaran perizinan juga berlaku, ketika perusahaan melakukan kegiatan yang tidak sesuai perizinan yang dimiliki. Misal, izin yang didapat adalah pengambilan air untuk disalurkan ke rumah-rumah. Ternyata kenyataannya, perusahaan tersebut juga menyalurkan secara komersial kepada perusahaan atau industri. "Ini juga pelanggaran izin. Karena peruntukannya salah," kata dia.

Yang jelas, lanjut Trubus,

tidak mungkin perusahaan swasta mendapat izin untuk menjual air kepada kalangan industri. Sebab, yang bisa menjual hanya BUMN atau BUMD. Walaupun perusahaan swasta mengantongi izin untuk menjual air, maka hanya bisa ditunjukkan kepada masyarakat dalam ruang lingkup domestik.

"Memang tidak boleh (jual kepada industri). Karena air, bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, menjadi urusan negara. Tidak boleh dikuasakan. Kalau pun swasta bisa menjual, hanya boleh dalam lingkup mikro," jelasnya.

Maka, lanjut Trubus, ketika perusahaan seperti PT DFT diduga menjual kepada industri, di sinilah antara lain, letak potensi kerugian negara. Sebab, seharusnya memang BUMN/BUMD seperti PDAM yang bisa menjual air kepada industri. Karena, penjualan dilakukan swasta, maka sebenarnya perusahaan itu mengambil alih keuntungan BUMN/BUMD.

"Jadi di sini potensi kerugian negara, yaitu dari potensi kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima BUMN/BUMD," kata Trubus. ● pra



AKSI JALAN ANTARKABUPATEN TERDAMPAK LONGSOR

Warga melintasi jembatan darurat di Desa Mekarjaya, Lebak, Banten, Jumat (10/6). Hujan deras yang terus mengguuyur kawasan tersebut mengakibatkan longsor sehingga mengganggu akses jalan alternatif Kabupaten Lebak-Pandeglang dan dikhawatirkan terjadi longsor susulan karena belum adanya pemasangan turap.

DUKUNG PENINGKATAN PELAYANAN

Pemkab Bogor Bantu Bangun Gedung Mako Polres Bogor

BOGOR (IM) - Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab Bogor) bersinergi dengan Polres Bogor melakukan pembangunan Gedung Utama Mako Polres Bogor.

Pembangunan gedung utama Mako Polres Bogor yang diawali dengan peletakan batu ini merupakan upaya jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor bersinergi dengan jajaran Polres Bogor untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan gedung yang lebih representatif tentunya akan semakin mendukung kelancaran tugas Jajaran Polres Bogor baik dalam hal penegakan hukum, pemeliharaan Kamtibmas dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

"Pembangunan ini sebagai wujud kerjasama antara Pemkab Bogor dengan jajaran Polres Bogor, intinya bangunan ini harus betul-betul sesuai dan tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasinya karena sekecil apapun uang negara harus dipertanggungjawabkan," ujar Burhanudin, Kamis (9/6).

Dukungan Pemkab Bogor terhadap pembangunan gedung Utama Mako Polres Bogor ini, kata Burhanudin, dilakukan sebab selama ini Polres Bogor telah memberikan banyak dukungan dalam upaya penanganan dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Bogor baik yang bersifat rutin maupun insidental. Juga dukungan penanggulangan bencana alam dan non alam, penanganan pandemi Covid-19 dan dukungan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor.

"Kami kalau tidak dibantu mereka, tidak mungkin target-target yang sudah ditentukan dapat tercapai, tentunya ini wujud kebersamaan karena

mengelola pemerintahan itu tidak bisa sendirian," ujarnya.

Burhanudin juga berharap, pembangunan gedung utama Mako Polres Bogor ini bisa berjalan lancar dan tidak ada gangguan, termasuk yang bekerjanya sehat. "Saya minta agar pihak ke-3 ini betul-betul dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Insyaallah kita akan melayani masyarakat dengan baik dan visi misi Pemkab Bogor sesuai RPJMD bisa tercapai," harapnya.

Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin mengatakan, Pemkab Bogor begitu ul out membantu jajaran Polres Bogor dalam memberikan bantuan fasilitas pelayanan gedung Polres Bogor. Gedung utama Polres Bogor ini merupakan gedung lama yang sudah banyak bocor, dilihat fisiknya sudah tidak begitu menarik.

Ia pun menjadikan pembangunan ini sebagai motivasi agar jajaran Polres Bogor bisa terus meningkatkan kualitas layanan kami kepada masyarakat Kabupaten Bogor. "Saya mengajak sekecil apapun uang negara harus dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Menurut Iman, dukungan yang Pemkab Bogor kepada Polres Bogor ini bukan semata-mata dukungan yang cuma-cuma, tapi ini adalah salah satu bentuk dan upaya dari Pemkab Bogor untuk bersama-sama dengan jajaran Polres Bogor meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Secemikian heterogen dan sedemikian tinggi dinamika sosial, dinamika ekonomi, politik dan budaya tentu kita harus jalankan dan hadapi dengan berbagai pelayanan yang maksimal oleh kepolisian khususnya Polres Bogor," katanya. ● gio